



BAKESBANGPOL



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022



**Jl. Ahmad Yani No.04 Pucang Kec, Sidoarjo
Kabupaten, Sidoarjo 61219**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Raya A. Yani No. 4

Telepon. 031 8921954

Email : bakesbangpolsidoarjo@gmail.com Website : sidoarjo.kab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188/ 09 /438.6.5/2021
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paling lambat satu Bulan setelah Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang system Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114)



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C)
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 57);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 41)



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum Pertama sebagai Pedoman Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo
- KETIGA : Daftar Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum Pertama tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak Juli 2021

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 12 Juli 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDOARJO**

Drs. MULYAWAN, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660922 198602 1 006



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rachmad serta karuniaNya sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dapat menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun anggaran 2022.

Dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo berisikan rencana dan tindakan strategis yang memuat Program maupun Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam tahun anggaran 2022. Rencana Kerja merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus, Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran kedepan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat, karena Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional dan dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2022 dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintrah daerah.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program / kegiatan / sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 dan untuk mereview hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan perkiraan realisasi capaian Tahun Berjalan (Tahun 2022). Melalui Dokumen Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi insitusi baik Pemerintah, Masyarakat maupun Institusi terkait.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan, sehingga Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat terlaksana dengan optimal, tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya rencana kerja ini.



Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan rencana kerja ini, oleh karena itu masukan serta saran yang membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Atas masukan serta saran yang positif dan membangun disampaikan terima kasih.

Sidoarjo, 12 Juli 2021

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Sidoarjo**

Drs. MULYAWAN, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660922 198602 1 006



DAFTAR ISI

COVER	
SK	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	15
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpol	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	18
2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD	52
3.3. Program dan Kegiatan OPD	53
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	56
BAB V PENUTUP	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Badan Kesatuan Bangsa dan politik ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2022.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota serta dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berbatasan. Oleh karena itu substansi penyusunan RKPD Tahun 2022 harus selaras dengan dokumen perencanaan baik di Tingkat Pusat, dokumen perencanaan di Tingkat Provinsi dan tidak terlepas memperhatikan pula dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten di Sidoarjo sehingga akan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Disamping itu RKPD penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025, sehingga kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo adalah menjembatani antara perencanaan strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah



kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan maupun program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dalamnya melaksanakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo secara bertahap telah mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo. Untuk anggaran 2022 sasaran yang harus dicapai adalah :

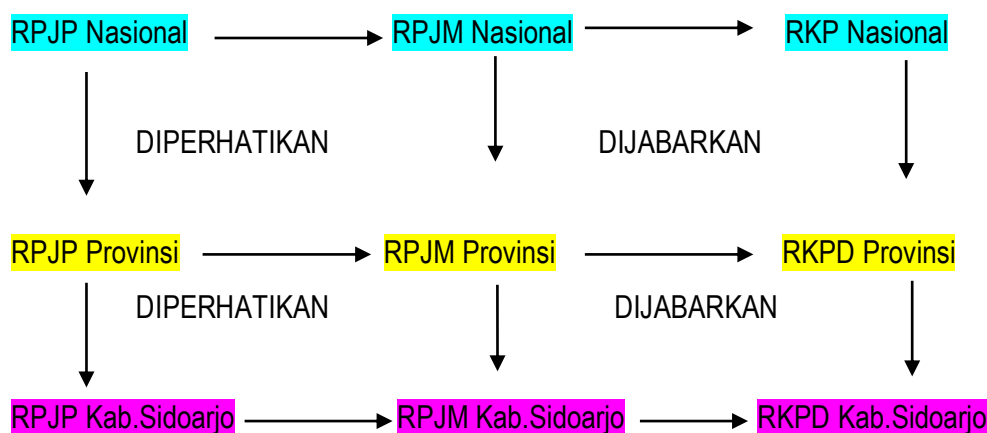
1. Meningkatnya pencegahan terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat
2. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan politik

Adapun tata cara dan alur penyusunan dokumen Renja OPD sebagai berikut :

1. Mengacu pada rencana awal RKPD
2. Mengacu pada Renstra SKPD
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya
4. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi
5. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

Keterkaitan antara RPJPD dengan RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Bagan Sinkronisasi RKPD Kabupaten Sidoarjo dengan Rencana Pembangunan Diatasnya





1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Perubahan pada Tahun anggaran 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan



- Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang system Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114)
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 43 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C)
 19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bnagsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 57);
 20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 41)



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022. RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022 adalah :

- 1) Terwujudnya koordinasi antar pelaku pembangunan
- 2) Terwujudnya Integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan
- 3) Terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan
- 4) Terciptanya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Untuk Tahun Anggaran 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo melaksanakan 4 program dan 13 kegiatan dengan jumlah anggaran setelah Perubahan Anggaran Kegiatan/PAK adalah sebesar Rp **15.100.877.898** sedangkan realisasinya sebesar Rp **12.149.795.050** atau **80,46%** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

REALISASI PROGRAM/KEGIATAN

No	Kegiatan	2020		%
		APBD Setelah PAK	Realisasi s/d 31 Des 2020	
1	2	3	4	5
	BELANJA	15.100.877.898	12.149.795.050	80,46
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.539.491.698	4.537.041.338	81,90
	<i>Belanja Tidak Langsung(Belanja pegawai/Gaji dll)</i>	5.539.491.698	4.537.041.338	81,90
B	BELANJA LANGSUNG	9.561.386.200	7.612.753.712	79,61
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	2.904.637.300	2.448.053.043	84,28
	1. Penyediaan barang/jasa perkantoran	988.187.775	648.533.353	65,63
	2. Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	1.125.563.800	1.102.249.460	97,93
	3. Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	575.672.925	554.130.220	96,26



No	Kegiatan	2020		%
		APBD Setelah PAK	Realisasi s/d 31 Des 2020	
	4. Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	207.612.800	139.619.260	67,25
	5. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	6.500.000	2.856.750	43,95
	7. Penyusunan laporan keuangan	1.100.000	664.000	60,36
2	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	4.212.682.200	3.361.210.000	79,79
	1. Pembinaan dan fasilitasi pencegahan konflik	1.005.855.600	768.730.000	76,43
	2. Penyelenggaraan penanggulangan konflik	3.128.581.000	2.564.955.000	81,98
	3. Deteksi Dini Terhadap Bahaya Radikalisme	78.245.600	27.525.000	35,18
3	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	1.545.417.400	1.124.198.069	72,74
	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan	1.263.577.800	959.565.000	75,94
	2. Pembinaan Pembauran dan Hak Azasi Manusia	281.839.600	164.633.069	58,41
4	Pogram Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar lembaga	898.649.300	679.292.600	75,59
	1. Kegiatan Pembinaan Budaya Politik	702.378.200	542.173.700	77,19
	2. Pembinaan hubngan antar lembaga	196.271.100	137.118.900	69,86
	TOTAL	15.100.877.898	12.149.795.050	80,46

Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo selama tahun anggaran 2020, dengan tingkat realisasi daya serap anggaran sebesar **80,46%**.

Secara umum, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo selama Tahun Anggaran 2020, relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya tingkat capaian kinerja dari kegiatan dan sasaran prioritas yang telah ditetapkan, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada beberapa kegiatan yang tingkat capaiannya dibawah 100%.



Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2

Sasaran 1 Meningkatnya pencegahan terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat

Sasaran dan Indikator Sasaran	2019			2020			Capaian 2019 Dibandingkan Capaian 2020
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)=(3/2x100)	(5)	(6)	(7)=(6/5x100)	(8)=(7/4)
1 Meningkatkan pencegahan terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat							
1. Jumlah potensi konflik / konflik yang dapat dicegah	0	20 konflik	80%	0	15 konflik	85%	106,25%

Tabel 2.1.3

Sasaran 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan politik

Sasaran dan Indikator Sasaran	2019			2020			Capaian 2019 Dibandingkan Capaian 2020
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)=(3/2x100)	(5)	(6)	(7)=(6/5x100)	(8)=(7/4)
1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan politik							
1. Persentase partisipasi masyarakat dalam PEMILU (Pilkada,	80%	82,9%	103,7%	85%	71,61%	84%	81%



Sasaran dan Indikator	2019			2020			Capaian 2019 Dibandingkan Capaian 2020
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pilgub, Pilpres dan Pileg)							

Berikut tabel mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra SKPD) ditahun 2020 adalah sebagai berikut :



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja SKPD Tahun 2020	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2021	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7)	11 = (10/4)
	Urusan Pemerintahan Umum									
	Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik									
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	a. Persentasi potensi konflik yang berhasil dicegah tepat waktu b. Persentase konflik yang berhasil di tangani	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	a. 100% b. 100%	0 konflik	a. 200% b. 200%	a. 100% b. 100%
	Pembinaan dan Fasilitasi pencegahan Konflik	Persentase laporan deteksi dini potensi konflik	100%	100%	100%	100%	100%	0	200%	100%



	Penyelenggaraan Penanggulangan Konflik	Jumlah konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%
	Rapat Koordinasi Keamanan dan Kenyamanan Daerah	Jumlah notulen rapat yang dihasilkan	12 Notulen	12 Notulen	0	0	0%	12 Laporan	24 Laporan	200%	200%
	Deteksi dini terhadap bahaya Radikalisme	Persentase laporan deteksi dini bahaya radikalisme	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	100%
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Kategori kabupaten peduli HAM	a. 400 Orang b. 90%	a. 100 Orang b. 90%	a. 100 Orang b. 90%	a. 100 Orang b. 90%	a. 90% b. 100%	a. 100 Orang	a. 200 Orang b. 180%	a. 100% b. 200%	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	a. jumlah peserta pelatihan dan pembinaan korp musik kebangsaan b. Jumlah peserta Bela Negara c. jumlah peserta sosialisasi Wawasan Kebangsaan	a. 40 Orang b. 100 orang c. 100 orang	a. 40 Orang b. 100 orang c. 100 orang	a. 40 Orang b. 100 orang c. 100 orang	a. 40 Orang b. 100 orang c. 100 orang	a. 100% b. 100% c. 100	a. 40 Orang b. 100 orang c. 100 orang	a. 80 Orang b. 200 orang c. 200 orang	a. 200% b. 100% c. 100%	
	Pembinaan Pembauran dan Hak Azasi Manusia	a. Jumlah peserta pembinaan HAM b. Jumlah peserta sosialisasi terkait	a. 100 Orang b. 17 etnis	a. 100 Orang b. 17 etnis	a. 100 orang b. 17 etnis	a. 100 orang b. 17 etnis	a. 100% b. 100%	a. 100 orang b. 17 etnis	a. 200 Orang b. 49 etnis	a. 200% b. 288%	



			pembauran etnis								
		Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	85%	82,9%	85%	71,61%	84%	0%	154,51%	181%
		Kegiatan Pembinaan Budaya Politik	a. Jumlah peserta sosialisasi partisipasi politik b. Jumlah Monev perkembangan politik c. Jumlah proposal Parpol yang diverifikasi dan memenuhi ketentuan	a. 100 orang b. 12 proposal c. 15 proposal	a. 100 orang b. 12 proposal c. 15 proposal	a. 100 orang b. 12 proposal c. 15 proposal	a. 100 orang b. 12 proposal c. 15 proposal	a. 100% b. 100% c. 100%	a. 100 orang b. 12 proposal c. 15 proposal	a. 200 orang b. 24 proposal c. 30 orang	a. 200% b. 200% c. 200%
		Pembinaan Hubungan Antar Lembaga	Jumlah Ormas yang di update Jumlah aktivitas dalam rangka menjaga harmonisasi Hubungan Antar Lembaga Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	a. 360 Ormas b. 3 kegiatan c. 15 Proposal	a. 360 Ormas b. 3 kegiatan c. 15 Proposal	a. 364 Ormas b. 3 kegiatan c. 15 Proposal	a. 364 Ormas b. 3 kegiatan c. 15 Proposal	a. 100% b. 100% c. 100%	a. 364 Ormas b. 3 kegiatan c. 15 proposal	a. 724 Ormas b. 6 kegiatan c. 30 proposal	a. 201% b. 200%



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

Berikut tabel 2.2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDOARJO

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (tnn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
	Indeks Toleransi	-	-	75,17	76,67	-	-	75,19	77,62	-	-	Renstra OPD 2016-2021



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpol

Dalam rangka pelayanan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo memberdayakan sumber daya manusia yang meliputi ;

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan
Sekretaris
- b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari :
 - a) Subid Wawasan Kebangsaan
 - b) Subid Pembauran dan HAM
 2. Bidang Budaya Politik dan Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
 - a) Subid Budaya Politik
 - b) Subid Hubungan Antar Lembaga
 3. Bidang Kewaspadaan, terdiri dari :
 - a) Subid Pencegahan Konflik
 - b) Subid Penanganan konflik
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Sidoarjo adalah 31 orang ditambah tenaga kontrak sebanyak 6 orang. Sumber daya manusia tersebut belum mencukupi dikarenakan banyak tempat – tempat kosong yang belum terisikan, dan banyak pegawai yang purna tugas, disamping itu pembagian kerja juga tidak merata dikarenakan sangat minimnya SDM, tetapi dalam hal memberikan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disamping itu, pelayanan kinerja OPD semakin meningkat dengan tersedianya tenaga baru yang memiliki kemampuan IT yang tinggi. Dengan demikian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana keinginan masyarakat.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana pelayanan yang berbasis digital
2. Belum optimalnya tempat pelayanan



Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa hal antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman fungsi Standar Operating Procedure Pelayanan.
2. . Kondisi baik internal maupun eksternal
3. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan kinerja pelayanan

1. Peluang

- a. Adanya kemauan pimpinan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung setiap kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dan juga dapat di lihat dari apresiasi yang sering di berikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam setiap skenario strategis turut membantu penyelesaian persoalan yang di nilai memiliki tingkat kepentingan yang cukup tinggi. Dalam keberadaan lembaga yang di nilai cukup strategis tentu dapat memainkan peran yang cukup penting, baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap Pemerintahan dalam memperdayakan infrastruktur politik dan suprastruktur kemampuan HAM. Dalam melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat maka terdapat peluang yang cukup benar untuk dapat menyerap sebanyak mungkin. Aspirasi masyarakat secara aktif ikut menentukan masyarakat kabupaten Sidoarjo dalam bidang politik dan HAM.
- c. Meningkatkan partisipasi aktif PARPOL, ORMAS, LSM dalam kehidupan demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo berusaha untuk menuju yang lebih baik di tanggung oleh lembaga lembaga resmi seperti LSM ,ORMAS, PARPOL.
- d. Adanya yang mendukung kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seperti Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 tentang organisasi lembaga teknis merupakan peluang bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam memantapkan eksistensinya sebagai satu satunya lembaga yang memiliki potensi sebagai satu satunya lembaga yang memiliki potensi dalam bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. Ditetapkannya akip melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan adanya pemberlakuan akip yang dalam penerapannya diawali dengan ketersediaannya renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo tentunya akan memberikan peluang untuk dapat menjaga konsistensi yang telah disiapkan sebelumnya sehingga strategi Badan Kesatuan Bangsa dan politik kabupaten Sidoarjo tidak berada di luar koridor strategi induk.

2. Tantangan

- a. Keraguan masyarakat terhadap kemungkinan masih adanya realita, dalam kehidupan berpolitik. Dengan adanya keraguan tersebut masyarakat kurang memahami.



- b. Munculnya kelompok- kelompok ekstrim yang memanfaatkan situasi politik di era Reformasi Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu kota terkena dampak lumpur lapindo, konflik nasional ini salah satunya muncul kelompok-kelompok ekstrim, yang akan mempengaruhi situasi dan kondisi dengan memanfaatkan kelompok tertentu, sehingga ini merupakan tantangan yang harus di antisipasi masa sekarang dan masa yang akan datang.
- c. Kurang Terukurnya Parameter Hasil Kegiatan.
Kurang terukurnya parameter hasil kegiatan, sebenarnya tidak terlepas dari sulitnya untuk memahami laporan kegiatan yang telah dihasilkan. Dengan kata lain dokumen laporan belum mampu memberikan prospektif yang nyata, untuk diwujudkan secara optimal, sehingga menimbulkan keraguan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan dan merealisasi. Selain itu juga belum dapat di gunakan sebagai referensi pengembangan tugas pokok Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
- d. Kurang Stabilnya Tenaga Potensial.
Seiring dengan bergulirnya desentralisasi yang menuntut adanya penataan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kurang harmonis, mengakibatkan berubahnya tenaga potensial dan kedangkalan tidak memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas. Hal ini selain berdampak pada berkurangnya kualitas kerja yang di hasilkan, dan juga mengurangi konsistensi pelaksanaan tugas sehingga hasilnya kurang optimal, baik dalam hal administrasi maupun laporan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (*topdown – bottom up*).



Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berikut tabel 2.4 tujuan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Sidoarjo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	7.821.411.164	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	7.480.235.286	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	a. 3 tahap b. 5 Macam	12.859.537	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	a. 3 tahap b. 5 Macam	11.878.750	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kab. Sidoarjo	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	5 Dokumen	12.859.537	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kab. Sidoarjo	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	5 Dokumen	11.878.750	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Kinerja SKPD					Kinerja SKPD					
2.	Administrasi Keuangan	Kab. Sidoarjo	Persentase realisasi anggaran PD	100%	5.600.135.173	Administrasi Keuangan	Kab. Sidoarjo	Persentase realisasi anggaran PD	100%	5.349.228.734	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidoarjo	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.596.561.234	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidoarjo	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5.346.561.234	
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sidoarjo	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	5 Dokumen	3.573.939	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Sidoarjo	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	5 Dokumen	2.667.500	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	1. 100% 2. 0	2.998.832	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi	1. 100% 2. 0	0	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sidoarjo	1. Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan 2. Jumlah laporan BMD SKPD yang	1. (3) macam 2. 4 Laporan	2.998.832	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Sidoarjo	1. Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan 2. Jumlah laporan	1. (3) macam 2. 4 Laporan	0	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			disusun					BMD SKPD yang disusun			
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	1. 100% 2. -	21.967.360	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	1. 100% 2. -	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidoarjo	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	36 Orang	21.967.360	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidoarjo	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	36 Orang	0	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		1.283.651.470	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sidoarjo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		1.128.396.762	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidoarjo	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	10 jenis	18.815.180	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidoarjo	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	10 jenis	11.620.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidoarjo	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	52 jenis	301.095.605	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidoarjo	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	52 jenis	323.343.945	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sidoarjo	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	4 Jenis	1.058.967	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sidoarjo	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	4 Jenis	871.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah BBM yang disediakan	6500 liter	211.994.114	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah BBM yang disediakan	6500 liter	211.994.114	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sidoarjo	Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	4 Jenis	7.464.672	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sidoarjo	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	4 Jenis	12.504.360	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sidoarjo	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	13 Jenis	49.012.575	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sidoarjo	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	13 Jenis	36.982.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Sidoarjo	Jumlah Tenaga Kebersihan yang terbayar	4 Orang	94.210.357	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Sidoarjo	Jumlah Tenaga Kebersihan yang terbayar	4 Orang	89.493.590	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidoarjo	Jumlah Jamuan Rapat/Tamu yang disediakan	1600 kotak	38.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidoarjo	Jumlah Jamuan Rapat/Tamu yang disediakan	1600 kotak	57.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kab. Sidoarjo	a. Persentase surat perintah tugas yang	a. 90%	562.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Kab.	Jumlah rapat koordinasi dan	a. 90%	384.587.153	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Konsultasi SKPD		ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	b. 90%		Konsultasi SKPD	Sidoarjo	konsultasi yang diselenggarakan Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	b. 90%		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	4 unit	104.541.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	4 unit	126.500.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Sidoarjo	Jumlah meubeleur yang diadakan	1 unit	60.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Sidoarjo	Jumlah meubeleur yang diadakan	1 unit	0	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Sidoarjo	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	3 unit	44.541.200	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Sidoarjo	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	3 unit	126.500.000	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidoarjo	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	629.823.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidoarjo	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100%	625.584.800	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidoarjo	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	300 surat	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidoarjo	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	300 surat	3.300.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidoarjo	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	120.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidoarjo	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	120.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidoarjo	1. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar; 2. Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang terbayar	1. 28 Orang 2. (2) Orang	506.823.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidoarjo	1. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar; 2. Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang terbayar	1. 28 Orang 2. (2) Orang	502.284.800	
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	28 kendaraan	165.434.392	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	28 kendaraan	238.646.240	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya b. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia c. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	a. 28 kendaraan b. 0 jenis c. 4 Unit	63.334.392	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya b. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia c. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	a. 28 kendaraan b. 0 jenis c. 4 Unit	65.046.240	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sidoarjo	Jumlah mebeleur yang dipelihara	12 bulan	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Sidoarjo	Jumlah mebeleur yang dipelihara	12 bulan	10.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidoarjo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	92.100.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidoarjo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	72.600.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidoarjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidoarjo	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 unit	91.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
								/rehabilitasi			
B.	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	a. 400 orang, b. 200 peserta c. 100 Orang	3.987.436.284	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	a. 400 orang, b. 200 peserta c. 100 Orang	1.665.779.600	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Sidoarjo	Jumlah buku panduan teknis sosialisasi ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	2 dokumen	3.987.436.284						
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Kab. Sidoarjo	Jumlah dokumen program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	2 dokumen	1.341.792.778					532.218.480	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sidoarjo	Jumlah buku panduan teknis sosialisasi Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2 dokumen	949.783.450					51.570.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah peserta sosialisasi Wasbang b. Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan Korp musik kebangsaan c. Jumlah peserta diklat Bela Negara d. Jumlah peserta pembinaan pembauran kebangsaan e. Jumlah peserta pembinaan Idiologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika	a. 100 orang, b. 50 Orang, 24 kegiatan c. 100 peserta d. 100 peserta e. 100 peserta f. 100 peserta	1.380.867.618					841.032.500	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
			f. Jumlah peserta Lomba lagu Nasional								
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sidoarjo	Jumlah koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	2 koordinasi	57.722.000					56.250.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sidoarjo	Jumlah laporan Monev di bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 laporan	257.270.438					163.708.620	
C	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN	Kab. Sidoarjo	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak	0%	5.233.608.248	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN	Kab. Sidoarjo	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak	0%	5.255.306.286	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		politiknya			LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		politiknya			
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah buku pedoman teknis sosialisasi pendidikan politik, etika, budaya politik b. Jumlah pedoman bantuan keuangan Partai Politik	a. 2 dokumen b. 2 dokumen	5.233.608.248	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah buku pedoman teknis sosialisasi pendidikan politik, etika, budaya politik b. Jumlah pedoman bantuan keuangan Partai Politik	a. 2 dokumen b. 2 dokumen	5.255.306.286	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah dokumen program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah b. Jumlah pedoman bantuan keuangan Partai Politik	a. 2 dokumen b. 2 dokumen	1.976.773	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah dokumen program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah b. Jumlah pedoman bantuan keuangan Partai Politik	a. 2 dokumen b. 2 dokumen	2.026.376	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Kab. Sidoarjo	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	a. 9 proposal b. 400 peserta c. 4 laporan	181.015.725	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Kab. Sidoarjo	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	a. 9 proposal b. 400 peserta c. 4 laporan	182.362.210	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Pemerinta han, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Fasilitasi Kelembaga an Pemerinta han, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah peserta pendidikan politik dan etika budaya politik b. Jumlah proposal bantuan keuangan Parpol yang disalurkan	a. 400 peserta b. 9 proposal	5.050.615.750	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah peserta pendidikan politik dan etika budaya politik b. Jumlah proposal bantuan keuangan Parpol yang disalurkan	a. 400 peserta b. 9 proposal	5.070.917.700	
D	PROGRAM PEMBERDAYA AN	Kab.	a. Jumlah Ormas yang didata	a. 364 Ormas b. 4 kegiatan	28.503.999.495	PROGRAM PEMBERDAYA AN	Kab.	a. Jumlah Ormas yang didata	a. 364 Ormas	26.106.587.432	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Sidoarjo	b. Jumlah pembinaan/pemberdayaan dan pengawasan Ormas c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	c. 12 proposal		DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Sidoarjo	b. Jumlah pembinaan/pemberdayaan dan pengawasan Ormas c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	b. 4 kegiatan c. 12 proposal		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Sidoarjo	Jumlah buku pedoman teknis pemberdayaan dan pengawasan Ormas	3 dokumen	28.503.999.495	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Sidoarjo	Jumlah buku pedoman teknis pemberdayaan dan pengawasan Ormas	3 dokumen	26.106.587.432	
	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah dokumen program kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 dokumen	3.074.108	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah dokumen program kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 dokumen	3.034.152	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah Ormas yang di data b. Jumlah peserta pemberdayaan dan pengawasan Ormas c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	a. 364 Ormas b. 400 peserta c. 12 proposal	756.030.632	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah Ormas yang di data b. Jumlah peserta pemberdayaan dan pengawasan Ormas c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	a. 364 Ormas b. 400 peserta c. 12 proposal	738.497.580	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah laporan monev Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 laporan	27.744.894.755	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah laporan monev Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 laporan	25.365.055.700	
E	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah potensi konflik yang berhasil dicegah secara dini b. Jumlah konflik yang berhasil ditangani	a. 0 ;b. 0	6.374.253.506	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah potensi konflik yang berhasil dicegah secara dini b. Jumlah konflik yang berhasil ditangani	a. 0 ;b. 0	655.322.040	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	KONFLIK SOSIAL					KONFLIK SOSIAL					
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah laporan deteksi dini potensi konflik b. Jumlah konflik yang tertangani c. Jumlah Notulen Rapat yang dihasilkan	a. 12 laporan b. 0 c. 12 laporan	6.374.253.506	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah laporan deteksi dini potensi konflik b. Jumlah konflik yang tertangani c. Jumlah Notulen Rapat yang dihasilkan	a. 12 laporan b. 0 c. 12 laporan	655.322.040	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah dokumen peta rawan konflik b. Jumlah dokumen peta rawan konflik sosial	a. 1 dokumen b. 1 dokumen	91.564.008	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah dokumen peta rawan konflik b. Jumlah dokumen peta rawan konflik sosial	a. 1 dokumen b. 1 dokumen	0	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan	Kab. Sidoarjo	Jumlah notulen yang dihasilkan	12 notulen	4.829.048	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang	Kab. Sidoarjo	Jumlah notulen yang dihasilkan	12 notulen	2.492.600	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah peserta sosialisasi FKDM b. Jumlah peserta sosialisasi FKDD, c. Jumlah SATGAS Pengungsi Luar Negeri d. Jumlah notulen yang dihasilkan	a. 400 peserta b. 400 peserta c. 25 orang d 12 notulen	1.388.655.950	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah peserta sosialisasi FKDM b. Jumlah peserta sosialisasi FKDD, c. Jumlah SATGAS Pengungsi Luar Negeri d. Jumlah notulen yang dihasilkan	a. 400 peserta b. 400 peserta c. 25 orang d 12 notulen	255.989.400	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan	Kab. Sidoarjo	Jumlah koordinasi	12 koordinasi	1.031.491.650	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan	Kab.	Jumlah koordinasi	12 koordinasi	0	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		yang dilaksanakan			Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sidoarjo	yang dilaksanakan			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah laporan yang dihasilkan	12 laporan	687.712.850	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah laporan yang dihasilkan	12 laporan	123.600.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Sidoarjo	umlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	12 laporan	3.170.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Sidoarjo	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	12 laporan	303.240.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	a. 3 kegiatan b. 12 laporan	1.643.472.717	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	a. 3 kegiatan b. 12 laporan	1.414.028.530	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Sidoarjo	Jumlah buku pedoman fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3 dokumen	1.643.472.717	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Sidoarjo	Jumlah buku pedoman fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3 dokumen	1.414.028.530	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Kab. Sidoarjo	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ketahanan	4 dokumen	2.049.440	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Kab. Sidoarjo	Jumlah dokumen program kerja di Bidang Ketahanan	4 dokumen	0	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah dokumen Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 dokumen	4.640.654	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah dokumen Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 dokumen	3.577.750	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah kegiatan ketahanan ekonomi sosial budaya	a. 12 kegiatan b. 800 peserta	733.883.800	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah kegiatan ketahanan ekonomi sosial budaya	a. 12 kegiatan b. 800	190.361.820	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		b. Jumlah peserta sosialisasi Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika c. Jumlah kegiatan fasilitasi FKUB	c. 4 kegiatan		Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		b. Jumlah peserta sosialisasi Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika c. Jumlah kegiatan fasilitasi FKUB	peserta c. 4 kegiatan		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah Rapat koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 kegiatan	616.078.800	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sidoarjo	Jumlah Rapat koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 kegiatan	959.040.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan	Kab. Sidoarjo	Jumlah laporan monev yang dihasilkan	12 kegiatan	287.241.900	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	Kab. Sidoarjo	Jumlah laporan monev yang dihasilkan	12 kegiatan	261.048.960	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					



2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan pelayanan, lembaga sosial masyarakat, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari OPD bisa melalui Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adapun untuk penjelasan tentang proses usulan Program / Kegiatannya perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Anggota / kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Kepala Daerah.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah ditunjuk menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pertimbangan atas permohonan masyarakat sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Sidoarjo

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Non Urusan					
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sidoarjo	100%	7.480.235.286	
1.	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	Kab. Sidoarjo	a. 3 tahap b. 5 Macam	11.878.750	
	Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	Kab. Sidoarjo	5 Dokumen	11.878.750	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
2	Administrasi Keuangan	Persentase realisasi anggaran PD	Kab. Sidoarjo	100%	5.349.228.734	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidoarjo	12 Bulan	5.346.561.234	
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	Kab. Sidoarjo	5 Dokumen	2.667.500	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kab. Sidoarjo		1.128.396.762	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	Kab. Sidoarjo	10 jenis	11.620.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kab. Sidoarjo	52 jenis	323.343.945	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Kab. Sidoarjo	4 Jenis	871.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	a. Jumlah BBM yang disediakan	Kab. Sidoarjo	6500 liter	211.994.114	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	Kab. Sidoarjo	4 Jenis	12.504.360	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	Kab. Sidoarjo	13 Jenis	36.982.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Tenaga Kebersihan yang terbayar	Kab. Sidoarjo	4 Orang	89.493.590	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Rapat/Tamu yang disediakan	Kab. Sidoarjo	1600 kotak	57.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	Kab. Sidoarjo	a. 90% b. 90%	384.587.153	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan	Kab. Sidoarjo	4 unit	126.500.000	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	Kab. Sidoarjo	3 unit	126.500.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	Kab. Sidoarjo	100%	625.584.800	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	Kab. Sidoarjo	300 surat	3.300.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	Kab. Sidoarjo	12 Bulan	120.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar; 2. Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang terbayar	Kab. Sidoarjo	1. 28 Orang 2. (2) Orang	502.284.800	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kab. Sidoarjo	28 kendaraan	238.646.240	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	a. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya b. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia c. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kab. Sidoarjo	a. 28 kendaraan b. 0 jenis c. 4 Unit	65.046.240	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	Kab. Sidoarjo	12 bulan	10.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Sidoarjo	6 unit	72.600.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Kab. Sidoarjo	1 unit	91.000.000	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
		dipelihara/rehabilitasi				
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	a. Jumlah Kader Wawasan Kebang saan b. Jumlah peserta Pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	Kab. Sidoarjo	a. 400 orang, b. 200 peserta c. 100 Orang	1.665.779.600	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah buku panduan teknis sosialisasi ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Kab. Sidoarjo	2 dokumen	1.665.779.600	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah dokumen program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sidoarjo	2 dokumen	553.218.480	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah buku panduan teknis sosialisasi Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kab. Sidoarjo	2 dokumen	51.570.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan	a. Jumlah peserta sosialisasi Wasbang b. Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan Korp musik kebangsaan c. Jumlah peserta diklat Bela Negara d. Jumlah peserta pembinaan	Kab. Sidoarjo	a. 100 orang, b. 50 Orang, 24 kegiatan c. 100 peserta d. 100 peserta e. 100 peserta f. 100 peserta	841.032.500	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
	Bangsa dan Politik)	pembauran kebangsaan e. Jumlah peserta pembinaan Idiologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika f. Jumlah peserta Lomba lagu Nasional				
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	Kab. Sidoarjo	12 Koordinasi	56.250.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah laporan Monev di bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sidoarjo	12 Laporan	163.708.620	
C	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	a. Jumlah potensi konflik yang berhasil dicegah secara dini b. Jumlah konflik yang berhasil ditangani	Kab. Sidoarjo	a. 0 ;b. 0	655.322.040	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	a. Jumlah laporan deteksi dini potensi konflik b. Jumlah konflik yang tertangani c. Jumlah Notulen Rapat yang dihasilkan	Kab. Sidoarjo	a. 12 laporan b. 0 c. 12 laporan	655.322.040	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah notulen yang dihasilkan	Kab. Sidoarjo	12 notulen	2.492.600	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	a. Jumlah peserta sosialisasi FKDM b. Jumlah peserta sosialisasi FKDD, c. Jumlah SATGAS Pengungsi Luar Negeri d. Jumlah notulen yang dihasilkan	Kab. Sidoarjo	a. 400 peserta b. 400 peserta c. 25 orang d. 12 notulen	225.989.440	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan yang dihasilkan	Kab. Sidoarjo	12 laporan	123.600.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	Kab. Sidoarjo	12 Laporan	303.240.000	
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Sidoarjo	a. 3 kegiatan b. 12 laporan	1.414.028.530	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah buku pedoman fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Sidoarjo	3 Dokumen	1.414.028.530	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah dokumen Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sidoarjo	4 Dokumen	3.577.750	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	a. Jumlah kegiatan ketahanan ekonomi sosial budaya b. Jumlah peserta sosialisasi Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika c. Jumlah kegiatan fasilitasi FKUB	Kab. Sidoarjo	a. 12 kegiatan b. 800 peserta c. 4 kegiatan	190.361.820	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah Rapat koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sidoarjo	12 kegiatan	959.040.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah laporan monev yang dihasilkan	Kab. Sidoarjo	12 kegiatan	261.048.960	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
	Kepercayaan di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)					
E	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	Kab. Sidoarjo	0%	5.255.306.286	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	a. Jumlah buku pedoman teknis sosialisasi pendidikan politik, etika, budaya politik b. Jumlah pedoman bantuan keuangan Partai Politik	Kab. Sidoarjo	a. 2 dokumen b. 2 dokumen	5.255.306.286	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembaga an Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	a. Jumlah dokumen program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembaga an Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah b. Jumlah pedoman bantuan keuangan Partai Politik	Kab. Sidoarjo	a. 2 dokumen b. 2 dokumen	2.026.376	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembaga an Pemerinta han, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemi lihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi	a. Jumlah proposal Parpol yang diverifikasi dan memenuhi ketentuan b. Jumlah peserta pendidikan politik dan etika budaya politik c. Jumlah pemantauan situasi politik di daerah	Kab. Sidoarjo	a. 9 proposal b. 400 peserta c. 4 laporan	182.362.210	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
	Politik Di Daerah					
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	a. Jumlah peserta pendidikan politik dan etika budaya politik b. Jumlah proposal bantuan keuangan Parpol yang disalurkan	Kab. Sidoarjo	a. 400 peserta b. 9 proposal	5.070.917.700	
F	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	a. Jumlah Ormas yang didata b. Jumlah pembinaan/pemberdayaan dan pengawasan Ormas c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	Kab. Sidoarjo	a. 364 Ormas b. 4 kegiatan c. 12 proposal	26.106.587.432	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah buku pedoman teknis pemberdayaan dan pengawasan Ormas	Kab. Sidoarjo	3 dokumen	26.106.587.432	
	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah dokumen program kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Sidoarjo	3 dokumen	3.034.152	
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Badan Kesatuan	a. Jumlah Ormas yang di data b. Jumlah peserta pemberdayaan dan pengawasan Ormas c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	Kab. Sidoarjo	a. 364 Ormas b. 400 peserta c. 12 proposal	738.497.580	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Catatan
	Bangsa dan Politik)					
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Jumlah laporan monev Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Sidoarjo	12 laporan	25.365.055.700	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo tidak lepas dari prioritas pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang diarahkan pada :

- a. Meningkatnya cegah dini dan deteksi dini masyarakat terhadap gangguan keamanan
- b. Meningkatnya Kewaspadaan masyarakat dalam cegah dini terhadap gangguan keamanan
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan politik
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan HAM dan mengurangi kejadian-kejadian terkait pelanggaran HAM dan SARA

Inisiatif-inisiatif strategi atau kebijakan umum dalam perspektif ini diantaranya adalah peningkatan kompetensi dan produktifitas SDM aparatur, budaya yang transparan dan akuntabel, serta dukungan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik yang memadai. Perspektif ini fokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan (masyarakat) secara efektif dan efisien. Kebijakan umum dalam perspektif adalah optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang ditentukan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun sesuai dengan pengaturan pelaksanaan dan diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Bakesbangpol kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat



2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan politik

2.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberrikan focus pada penyusunan program dan kegiatan. Adapaun sasaran yang ingin dicapai oleh Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pencegahan terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan politik

3.3. Program dan Kegiatan OPD

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk menghasilkan atau mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu Instansi Pemerintah atau lembaga dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu, sedangkan kegiatan merupakan suatu peristiwa/kejadian yang pada umumnya tidak dilakukan secara terus menerus, bisa diselenggarakan oleh Badan, Instansi Pemerintah, Organisasi maupun orang pribadi dengan berbagai alasan tertentu atau bahkan sosialisasi sebuah kebijakan Pemerintah.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 ditunjang dengan 6 program dan 11 kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH :

- o Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- o Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- o Administrasi Umum Perangkat Daerah
- o Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- o Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- o Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

- o Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK



- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

a. Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan kegiatan meliputi :

- **Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan :**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 6 (enam) Program dan terdiri dari 11 (sebelas) Kegiatan.

- **Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan :**

Dalam Program dan Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo meliputi Alat Kelengkapan Aparatur. Sehingga dalam memfasilitasi akan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- **Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif :**

Sesuai dengan Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo mendapat Anggaran APBD sebesar Rp. 42.450.759.174 (Empat Puluh dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah), Total anggaran tersebut terdiri dari Total Anggaran Belanja Langsung dan Total Anggaran Belanja Tidak Langsung.

b. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan Tidak Sesuai Dengan Rancangan Awal RKPD baik Jenis Program/Kegiatan, Pagu Indikatif, maupun Kombinasi Keduanya :



Apabila tidak sesuai dalam rumusan program maupun kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasinya maka akan ditinjau kembali dengan mengajukan Perubahan Anggaran Keuangan/PAK sesuai dengan apa yang akan diharapkan dalam program kegiatan berikutnya.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 diperlukan rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan. Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain :

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 –2026 dan hasil review Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan;

Secara garis besar rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 merupakan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebanyak 6 program di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
- 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022 sebanyak 11 kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.
- 4) Kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Sidoarjo, Program dan kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana Table berikut :



Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Sidoarjo

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2																	
2	23																
2	23	01															
2	23	01	2.01						11.878.750					12.472.688			
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90%	5 dokumen		11.878.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	12.472.688
2	23	01	2.02						5.349.228.734					5.616.690.171			
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan	Tingkat kepuasan	Jumlah ASN yang		Badan	100%	30 Orang		5.346.561.234	Pendapatan	Tingkat kepuasan	100%	5.616.690.171



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Tunjangan ASN	aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	mendapatkan gaji dan tunjangan		Kesatuan Bangsa dan Politik					Asli Daerah (PAD)		aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		
2 23 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	1 Dokumen		2.667.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	2.800.875
2 23 01 2.03	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.128.396.762					1.184.816.600
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	10 Jenis		11.620.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	12.201.420



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	52 jenis		323.343.945	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	339.511.142
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah peralatan Rumah Tangga yang tersedia		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	4 jenis		871.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	914.760
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah BBM yang disediakan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	6500 liter		211.994.114	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	222.593.820
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang	Tingkat kepuasan	Jumlah cetak		Badan	90%	13 jenis		36.982.200	Pendapatan		Tingkat kepuasan	90%	38.831.310



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
	Cetakan dan Penggandaan	aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	penggandaan yang tersedia		Kesatuan Bangsa dan Politik						Asli Daerah (PAD)		aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90%	8 jenis		12.504.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	13.129.578	
2 23 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah tenaga kebersihan yang terbayar		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	4 Orang		89.493.590	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	93.968.270	
2 23 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat kepuasan aparatur perangkat	Jumlah Jamuan Rapat/Tamu		Badan Kesatuan	90%	1600 kotak		57.000.000	Pendapatan Asli Daerah		Tingkat kepuasan aparatur perangkat	90%	59.850.000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
		daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	yang disediakan		Bangsa dan Politik						(PAD)		daerah terhadap pelayanan kesekretariatan		
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Persentase surat perintah tugas yang ditindak lanjuti		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90%	90%		384.587.153	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	403.816.511	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								126.500.000					132.825.000	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	3 unit		126.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	132.825.000	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								625.584.800				656.864.040	
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90%	300 surat		3.300.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	3.465.000
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	12 bulan		120.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	126.000.000
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	a. jumlah pengelola keuangan yang terbayar b. Jumlah tenaga penunjang		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%	a. 28 Orang b. 2 Orang		502.284.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	527.399.040



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia											
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								238.646.240					250.578.552
8 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	a. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya b. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia ; c. jumlah kendaraan dinas/operasional yang		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90%	a. 28 kendaraan b. 0 jenis c. 4 unit		65.046.240	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	68.298.552



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			dipelihara											
8 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah mebeleur yang dipelihara		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90%	12 bulan		10.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	10.500.000
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90%	6 unit		72.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	76.230.000
8 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90%	1 unit		91.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	95.550.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 02		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							1.665.779.600				1.749.068.580	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	Jumlah buku panduan teknis sosialisasi ideologi pancasila dan karakter kebangsaan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 100 Orang b. 100 peserta c. 100 orang	2 dokumen		1.665.779.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	a. 100 Orang b. 100 peserta c. 100 orang	1.749.068.580
8 01 02 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan	Jumlah dokumen program kerja di bidang ideologi wawasan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 100 Orang b. 100 peserta	2 dokumen		553.218.480	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan	a. 100 Orang b. 100 peserta	580.879.404



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			c. 100 orang						ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	c. 100 orang	
8 01 02 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	Jumlah buku panduan teknis sosialisasi Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 100 Orang b. 100 peserta c. 100 orang	2 dokumen		51.570.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	a. 100 Orang b. 100 peserta c. 100 orang	54.148.500



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	a. Jumlah peserta sosialisasi Wasbang b. Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan Korp musik kebangsaan c. Jumlah peserta diklat Bela Negara d. Jumlah peserta pembinaan pembauran kebangsaan e. Jumlah peserta pembinaan Idiologi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika f. Jumlah peserta		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 100 Orang b. 100 peserta c. 100 orang	100 orang 50 orang 100 peserta 100 peserta 100 peserta		841.032.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	a. 100 Orang b. 100 peserta c. 100 orang	883.084.125



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Lomba lagu Nasional											
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 100 Orang b. 100 peserta c. 100 orang	12 koordinasi		56.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	a. 100 Orang b. 100 peserta c. 100 orang	59.062.500
8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan	Jumlah laporan yang dihasilkan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 100 Orang b. 100 peserta	12 laporan		163.708.620	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah Kader Wawasan Kebangsaan b. Jumlah peserta Pemantapan	a. 100 Orang b. 100 peserta	171.894.051



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan				c. 100 orang						ideologi pancasila dan karakter kebangsaan c. Jumlah peserta kader Bela Negara dan karakter kebangsaan	c. 100 orang	
8 01 03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						5.255.306.286						5.255.306.286
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	a. Jumlah buku pedoman teknis sosialisasi pendidikan politik, etika, budaya politik b. Jumlah pedoman bantuan keuangan Partai Politik		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0%	a. 2 dokumen b. 2 dokumen		5.255.306.286	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	0%	5.255.306.286



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
8 01 03 2.01 01	Pemantauan Situasi Politik														
8 01 03 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	a. Jumlah dokumen program kerja di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0%	a. 2 dokumen b. 2 dokumen		2.026.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	0%	2.026.376	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Situasi Politik di Daerah b. Jumlah pedoman bantuan keuangan Partai Politik											
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	a. Jumlah proposal Parpol yang diverifikasi dan memenuhi ketentuan b. Jumlah peserta pendidikan politik dan etika budaya politik c. Jumlah pemantauan situasi politik di daerah		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0%	a. 9 proposal b. 400 peserta c. 4 laporan		182.362.210	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	0%	182.362.210



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		a. Jumlah peserta pendidikan politik dan etika budaya politik b. Jumlah proposal bantuan keuangan Parpol yang disalurkan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0%	a. 400 peserta b. 9 proposal		5.070.917.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Persentase partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya	0%	5.070.917.700
8 01 04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						26.106.587.432						27.106.587.432
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	a. Jumlah Ormas yang didata b. Jumlah pembinaan/pemberdayaan dan pengawasan Ormas c. Jumlah proposal Ormas yang	Jumlah buku pedoman teknis pemberdayaan dan pengawasan Ormas		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 364 Ormas b. 4 kegiatan c. 12 proposal	3 dokumen		26.106.587.432	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah Ormas yang didata b. Jumlah pembinaan/pemberdayaan dan pengawasan Ormas	a. 364 Ormas b. 4 kegiatan c. 12 proposal	27.106.587.432



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
		diverifikasi										c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi		
8 01 04 2.01 01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	a. Jumlah Ormas yang didata b. Jumlah pembinaan/pemberdayaan dan pengawasan Ormas c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	Jumlah dokumen program kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 364 Ormas b. 4 kegiatan c. 12 proposal	3 dokumen		3.034.152	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah Ormas yang didata b. Jumlah pembinaan/pemberdayaan dan pengawasan Ormas c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	a. 364 Ormas b. 4 kegiatan c. 12 proposal	3.185.860
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	a. Jumlah Ormas yang didata b. Jumlah pembinaan/pemberdayaan dan	a. Jumlah Ormas yang di data b. Jumlah		Badan Kesatuan Bangsa dan	a. 364 Ormas b. 4 kegiatan c. 12	336 ormas 12 proposal 400 peserta		738.497.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah Ormas yang didata b. Jumlah pembinaan/pemberdayaan dan	a. 364 Ormas b. 4 kegiatan c. 12	775.422.459



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	pengawasan Ormas c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	proposal Ormas yang diverifikasi c. Jumlah peserta pemberdayaan dan pengawasan Ormas		Politik	proposal						pengawasan Ormas c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	proposal	
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	a. Jumlah Ormas yang didata b. Jumlah pembinaan/pemberdayaan dan pengawasan Ormas c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	Jumlah laporan monev Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 364 Ormas b. 4 kegiatan c. 12 proposal	12 laporan		25.465.055.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah Ormas yang didata b. Jumlah pembinaan/pemberdayaan dan pengawasan Ormas c. Jumlah proposal Ormas yang diverifikasi	a. 364 Ormas b. 4 kegiatan c. 12 proposal	26.738.308.485



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAY							1.414.028.530				1.484.729.957	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah buku pedoman fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 3 kegiatan b. 12 laporan	3 dokumen		1.414.028.530	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	a. 3 kegiatan b. 12 laporan	1.484.729.957
8 01 05 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan	Jumlah dokumen Kebijakan di Bidang Ketahanan		Badan Kesatuan Bangsa dan	a. 3 kegiatan b. 12 laporan	4 dokumen		3.577.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan	a. 3 kegiatan b. 12 laporan	3.756.638



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Politik							ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	a. Jumlah kegiatan ketahanan ekonomi sosial budaya b. Jumlah peserta sosialisasi Fasilitasi		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 3 kegiatan b. 12 laporan	12 kegiatan 800 peserta 4 kegiatan		190.361.820	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	a. 3 kegiatan b. 12 laporan	199.879.911



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Kepercayaan di Daerah	b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika c. Jumlah kegiatan fasilitasi FKUB									b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Rapat koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 3 kegiatan b. 12 laporan	12 kegiatan		959.040.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial	a. 3 kegiatan b. 12 laporan	1.006.992.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			Kepercayaan di Daerah									dan Budaya		
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah laporan monev yang dihasilkan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 3 kegiatan b. 12 laporan	12 kegiatan		261.048.960	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan serta informasi yang berkaitan dengan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya b. Jumlah monitoring dan evaluasi serta pelaporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	a. 3 kegiatan b. 12 laporan	274.101.408
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								655.322.040					688.088.142



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	a. Jumlah potensi konflik yang berhasil dicegah secara dini b. Jumlah konflik yang berhasil ditangani	a. Jumlah laporan deteksi dini potensi konflik b. Jumlah konflik yang tertangani c. Jumlah Notulen Rapat yang dihasilkan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 0 ;b. 0	a. 12 laporan b. 0 c. 12 laporan		655.322.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah potensi konflik yang berhasil dicegah secara dini b. Jumlah konflik yang berhasil ditangani	a. 0 ;b. 0	688.088.142
8 01 06 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	a. Jumlah potensi konflik yang berhasil dicegah secara dini b. Jumlah konflik yang berhasil ditangani	Jumlah notulen yang dihasilkan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 0 ;b. 0	12 notulen		2.492.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah potensi konflik yang berhasil dicegah secara dini b. Jumlah konflik yang berhasil ditangani	a. 0 ;b. 0	2.617.230
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan	a. Jumlah potensi konflik yang berhasil	a. Jumlah peserta		Badan Kesatuan	a. 0	400 peserta		225.984.440	Pendapatan Asli Daerah		a. Jumlah potensi konflik yang	a. 0	268.783.662



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	dicegah secara dini b. Jumlah konflik yang berhasil ditangani	sosialisasi FKDM b. Jumlah peserta sosialisasi FKDD, c. Jumlah SATGAS Pengungsi Luar Negeri d. Jumlah notulen yang dihasilkan		Bangsa dan Politik	;b. 0	400 peserta 25 orang 12 notulen			(PAD)		berhasil dicegah secara dini b. Jumlah konflik yang berhasil ditangani	;b. 0	
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	a. Jumlah potensi konflik yang berhasil dicegah secara dini b. Jumlah konflik yang berhasil ditangani	Jumlah laporan yang dihasilkan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 0 ;b. 0	12 laporan		123.600.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah potensi konflik yang berhasil dicegah secara dini b. Jumlah konflik yang berhasil ditangani	a. 0 ;b. 0	129.780.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah potensi konflik yang berhasil dicegah secara dini b. Jumlah konflik yang berhasil ditangani	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. 0 ;b. 0	12 laporan		303.240.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		a. Jumlah potensi konflik yang berhasil dicegah secara dini b. Jumlah konflik yang berhasil ditangani	a. 0 ;b. 0	318.402.000
									42.450.759.174					43.449.939.306



BAB V PENUTUP

Dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo tahun 2022. Untuk mencapai keberhasilan dalam Rencana Kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari aparaturnya maupun Organisasi Perangkat Daerah /OPD itu sendiri, instansi terkait maupun partisipasi aktif masyarakat. Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku/stakeholders dalam menciptakan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya kebawah/trickle down effect, sehingga keberpihakan kepada masyarakat kecil tersebut benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2022 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2022, Rencana Kerja dapat dipergunakan pula sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun kegiatan bagi aparaturnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo, diharapkan juga bisa menjadi dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa yang akan datang oleh pimpinan OPD maupun staf di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.



Dalam pelaksanaan program dan kegiatan rutin tahunan maupun pembangunan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo akan diimplementasikan secara maksimal guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Sidoarjo secara menyeluruh. Insya Allah.

Sidoarjo, 12 Juli 2021

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sidoarjo**

Drs. MULYAWAN, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660922 198602 1 006



LAMPIRAN – LAMPIRAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Jumlah										
									T-1	T				14 = (10+11+12+13)					
										Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah				
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				42,450,759,174	226,500,000	0	0	0	42,677,259,174					
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,353,735,286	126,500,000	0	0	0	7,480,235,286					
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11,878,750	0	0	0	0	11,878,750					
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,878,750	0	0	0	0	11,878,750					
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,349,228,734	0	0	0	0	5,349,228,734					
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,346,561,234	0	0	0	0	5,346,561,234					
8	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sidoarjo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,667,500	0	0	0	0	2,667,500					
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,128,396,762	0	0	0	0	1,128,396,762					
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11,620,400	0	0	0	0	11,620,400					
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		323,343,945	0	0	0	0	323,343,945					
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		871,200	0	0	0	0	871,200					
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		211,994,114	0	0	0	0	211,994,114					
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36,982,000	0	0	0	0	36,982,000					
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12,504,360	0	0	0	0	12,504,360					
8	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		89,493,590	0	0	0	0	89,493,590					

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	T				Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		57,000,000	0	0	0	57,000,000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		384,587,153	0	0	0	384,587,153
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	126,500,000	0	0	126,500,000
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	126,500,000	0	0	126,500,000
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				625,584,800	0	0	0	625,584,800
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,300,000	0	0	0	3,300,000
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		120,000,000	0	0	0	120,000,000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		502,284,800	0	0	0	502,284,800
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				238,646,240	0	0	0	238,646,240
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		65,046,240	0	0	0	65,046,240
8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10,000,000	0	0	0	10,000,000
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72,600,000	0	0	0	72,600,000
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		91,000,000	0	0	0	91,000,000
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1,665,779,600	0	0	0	1,665,779,600
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1,665,779,600	0	0	0	1,665,779,600
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		553,218,480	0	0	0	553,218,480

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	T				Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51,570,000	0	0	0	51,570,000
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		841,032,500	0	0	0	841,032,500
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		56,250,000	0	0	0	56,250,000
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		163,708,620	0	0	0	163,708,620
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			5,255,306,286	0	0	0	5,255,306,286	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			5,255,306,286	0	0	0	5,255,306,286	
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,026,376	0	0	0	2,026,376
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		182,362,210	0	0	0	182,362,210

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	T				Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5,070,917,700	0	0	0	5,070,917,700
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				26,106,587,432	100,000,000	0	0	26,206,587,432
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				26,106,587,432	100,000,000	0	0	26,206,587,432
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,034,152	0	0	0	3,034,152
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		738,497,580	0	0	0	738,497,580
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25,365,055,700	100,000,000	0	0	25,465,055,700
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				1,414,028,530	0	0	0	1,414,028,530
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				1,414,028,530	0	0	0	1,414,028,530
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3,577,750	0	0	0	3,577,750
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		190,361,820	0	0	0	190,361,820
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		959,040,000	0	0	0	959,040,000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	T				Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		261,048,960	0	0	0	261,048,960
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				655,322,040	0	0	0	655,322,040
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				655,322,040	0	0	0	655,322,040
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,492,600	0	0	0	2,492,600
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		225,989,440	0	0	0	225,989,440
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		123,600,000	0	0	0	123,600,000
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		303,240,000	0	0	0	303,240,000